

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sejarah politik Indonesia, hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU) selalu menjadi salah satu topik yang menarik perhatian, terutama karena keduanya memiliki akar sejarah yang kuat dan basis ideologis yang sama. NU, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, telah lama memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran sosial dan politik masyarakat, terutama di kalangan umat Islam tradisional. Sementara itu, PKB, yang didirikan pada tahun 1998, merupakan perwujudan politik dari aspirasi warga *nahdliyin*. Namun, hubungan antara NU dan PKB tidak selalu harmonis. Ketegangan yang muncul sering kali mencerminkan perbedaan kepentingan dan strategi, baik di tingkat pusat maupun daerah (Dinar dan Ardianto, 2019). Situasi ini menjadi semakin relevan dalam konteks Pemilu Legislatif 2024, khususnya di Kabupaten Pekalongan, yang dikenal sebagai salah satu basis kuat NU.

Tingkat “elite” NU (Nahdlatul Ulama) sedang mengalami gejolak yang cukup besar. KH. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU) dan beberapa orang pemimpin NU lainnya (termasuk KH. Said Aqil Siradj) dari PB Syuriah NU secara terbuka telah menyatakan antara NU dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) tidak ada hubungan apa pun. Padahal dalam kenyataan PKB didirikan atas perintah PBNU beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya, PKB adalah sayap politik bagi warga NU karena NU sendiri bukanlah parpol, namun memiliki hubungan historis,

budaya, dan lain-lain dengan PKB. Dalam sebuah pengajian PKB di Gringsing (Batang), beberapa bulan yang lalu penulis diberitahu KH. Muhaiminan Gunardlo (Parakan, Temanggung) bahwa Ketua Umum PBNU itu menyebabkan kegalauan warga NU di kawasan Pantura (Pantai Utara) Jawa Tengah dengan ungkapan itu. (<https://gusdur.net/nu-lain-dulu-lain-sekarang/>)

Sebelumnya ketegangan antara PKB dan PBNU kian memanas dan merembet ke soal panitia khusus (Pansus) Haji 2024. Sejumlah anggota Pansus Haji meminta agar PBNU tak ikut campur urusan politik di Senayan. Pernyataan anggota Pansus Haji ini muncul menyusul tuduhan dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bahwa Pansus Haji dibentuk untuk mengincar elite di NU. Anggota Pansus Haji dari fraksi DPR, Luluk Nur Hamidah menilai pernyataan Gus Yahya terlalu meremehkan fraksi-fraksi di DPR yang mengusulkan dan menyetujui pembentukan Pansus. Luluk pun membantah bahwa Pansus Haji dibentuk untuk menyerang pribadi elite di PBNU. (<https://www.metrotvnews.com/play/b3JCrnjE-awal-mula-ketegangan-hubungan-pbnu-dan-pkb>)

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf sebelumnya mengendus kepentingan pribadi di balik pembentukan Pansus untuk mendalami pelaksanaan haji 2024. Gus Yahya curiga salah satu tujuan Pansus yakni untuk menyerang PBNU, karena Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya Yahya Cholil Qoumas. Terkait ketegangan yang terjadi antara PBNU dan PKB, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kisruh yang terjadi antara keduanya segera disudahi. Menurut Wapres, ketegangan antara PBNU dan PKB merupakan hal yang aneh dan tidak seharusnya terjadi, karena keduanya memiliki tugas yang berbeda. Di mana

PBNU fokus pada pembangunan keumatan, sedangkan PKB di jalur politik. Berbeda dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau yang akrab disapa Gus Nadir mendorong para anggota Pansus Haji tidak terpengaruh dengan pernyataan ketua umum PBNU Gus Yahya. Mantan pengurus PBNU itu menilai ada banyak hal yang mesti diselidiki dari pelaksanaan ibadah haji selama ini. Dinamika yang terjadi antara PBNU dengan Pansus haji yang dibentuk DPR sebetulnya bermula dari kegelisahan pengurus PBNU terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. PBNU merasa PKB telah menyepelekan pengurus di NU dengan lontaran yang tidak pantas dan merendahkan. (<https://www.metrotvnews.com/play/b3JCrnjE-awal-mula-ketegangan-hubungan-pbnu-dan-pkb>)

Ketegangan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di tingkat pusat menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hubungan antara keduanya di tingkat lokal, terutama di Kabupaten Pekalongan. Secara ideal, hubungan ini semestinya harmonis mengingat latar belakang sejarah dan nilai-nilai yang sama. Namun, kenyataannya, perbedaan pandangan strategis dan kepentingan politik sering kali memicu ketegangan. Hubungan antara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) menjadi kunci untuk memahami bagaimana dampak politik pusat dirasakan di daerah (Adnan 2021). Dalam konteks ini, penelitian ini mencoba menggali apakah ketegangan di tingkat pusat berimbas pada stabilitas dukungan politik PKB di Kabupaten Pekalongan, serta bagaimana hal ini memengaruhi masyarakat *nahdliyin* di daerah tersebut.

Kajian literatur memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami dinamika ini. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai aspek penting dari hubungan antara organisasi keagamaan dan partai politik. Misalnya, (Sodakh *et al.*, 2019) menyoroti peran tokoh agama dalam memobilisasi dukungan politik, terutama dalam konteks lokal. Dalam analisisnya, kyai sering kali menjadi mediator antara NU dan PKB, memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan politik dan keagamaan. Sementara itu, (Haris, 2012) menguraikan sejarah panjang keterlibatan NU dalam politik, mulai dari partisipasinya dalam Masyumi hingga pembentukan PKB. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun NU mencoba kembali ke khittah sebagai organisasi keagamaan non-politik pada tahun 1984, hubungan antara NU dan politik tetap sulit dipisahkan. Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh (Kusmayadi *et al.*, 2017), menekankan peran sentral kyai dalam mengarahkan perilaku politik warga NU, sekaligus mencatat pergeseran dukungan dari PPP ke PKB sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih luas.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan berharga, namun fokusnya cenderung bersifat nasional atau umum tanpa menggali secara spesifik dampak ketegangan di tingkat pusat terhadap hubungan di tingkat daerah. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi bagaimana ketegangan antara DPP PKB dan PBNU mempengaruhi dinamika politik lokal di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah dengan basis pendukung NU dan PKB yang signifikan, sehingga dampak dari ketegangan politik pusat menjadi isu penting untuk diteliti.

Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi hubungan antara DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan dalam konteks ketegangan politik pusat. Dengan menganalisis dampak ketegangan pusat terhadap daerah, penelitian ini tidak hanya memberikan pandangan baru tentang dinamika politik lokal di Indonesia, tetapi juga menawarkan kontribusi penting pada kajian hubungan antara organisasi keagamaan dan partai politik, khususnya dalam konteks lokal yang sering kali kurang mendapat perhatian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi PKB dan NU dalam mengelola hubungan mereka, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat menjaga harmoni yang mendukung stabilitas politik lokal dan nasional.

Topik ini menjadi semakin relevan karena hubungan antara PKB dan NU tidak hanya berdampak pada dinamika politik lokal, tetapi juga memiliki implikasi nasional. Kabupaten Pekalongan, misalnya, merupakan salah satu daerah yang menjadi basis kekuatan politik PKB. Pada Pemilu 2019, PKB berhasil memperoleh 15 kursi di DPRD Kabupaten Pekalongan, meningkat dari 12 kursi pada Pemilu 2014 (Ardianto 2019). Peningkatan ini menunjukkan pentingnya hubungan yang harmonis antara DPC PKB dan PCNU dalam mempertahankan dukungan politik di daerah ini. Namun, ketegangan antara DPP PKB dan PBNU di tingkat pusat dapat mengganggu stabilitas hubungan di tingkat daerah. Jika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya dapat merusak dukungan masyarakat NU terhadap PKB, yang pada akhirnya memengaruhi hasil Pemilu Legislatif 2024 (Adnan 2021).

Penelitian ini menggunakan teori konflik sosial dari Lewis A. Coser dan teori *vested interest* sebagai kerangka analisis. Menurut Coser, konflik dapat menjadi alat perubahan sosial yang konstruktif jika dikelola dengan baik (Coser 1957). Dalam konteks hubungan antara PKB dan NU, ketegangan yang terjadi dapat dilihat sebagai peluang untuk memperjelas peran dan fungsi masing-masing entitas. Sementara itu, teori *vested interest* menjelaskan bahwa konflik sering kali dipicu oleh kepentingan individu atau kelompok yang berusaha mempertahankan atau memperkuat posisi dan kekuasaan mereka (Rofiah 2017). Dengan menggunakan kedua teori ini, penelitian ini mencoba memahami dinamika ketegangan antara PKB dan NU sebagai hasil dari benturan kepentingan politik dan keagamaan, sekaligus mengeksplorasi potensi perubahan positif yang dapat muncul dari konflik tersebut.

Dengan menggabungkan pendekatan teoritis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada. Fokus utamanya adalah bagaimana ketegangan politik di tingkat pusat memengaruhi hubungan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengelolaan hubungan antara partai politik dan organisasi keagamaan di Indonesia. Dengan memahami dampak ketegangan ini, dapat mengetahui adanya pola hubungan DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, dapat mengetahui hubungan elit PKB dan NU dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk menjaga harmoni, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional. Hubungan antara PKB dan NU, jika

dikelola dengan baik, dapat menjadi contoh bagaimana konflik dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat dua pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana dampak ketegangan politik antara DPP PKB dan PBNU pada DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana respon DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan terhadap ketegangan politik antara DPP PKB dan PBNU terkait strategi pemenangan Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dampak ketegangan politik antara DPP PKB dan PBNU pada DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan?
2. Untuk menganalisis respon DPC PKB dan PCNU di Kabupaten Pekalongan terhadap ketegangan politik antara DPP PKB dan PBNU terkait strategi pemenangan Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika internal PKB dan dampaknya terhadap NU di Kabupaten Pekalongan, serta memberikan kontribusi pada kajian ilmu politik Indonesia dalam konteks hubungan antara partai politik dan organisasi keagamaan.

1.5 Literatur Review

Ditemukan beberapa literatur yang terkait dengan relasi antara organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), antara lain:

Penelitian pertama yakni, artikel yang ditulis oleh (Adi Pradana 2020) “Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama Dalam Hegemoni Pemilukada 2020” menyoroti bagaimana tokoh agama berperan penting dalam dinamika politik lokal, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Mereka menekankan bahwa tokoh-tokoh agama, termasuk yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU), memainkan peran krusial dalam mengarahkan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Relasi kuasa yang dibentuk antara tokoh agama dan kandidat politik sering kali berbentuk simbiosis, di mana kandidat politik mendapatkan dukungan elektoral, sementara tokoh agama dan organisasi di baliknya, seperti NU, memperoleh pengaruh politik yang lebih besar. Dalam konteks Pemilukada 2020, NU, yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat akar rumput, memainkan peran strategis dalam mendukung kandidat yang sejalan dengan agenda politiknya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui dukungan terbuka dari tokoh-tokoh NU terhadap kandidat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Relasi antara PBNU dan PKB ini semakin mempertegas bahwa PKB sebagai representasi politik NU selalu mendapatkan dukungan dari organisasi tersebut, terutama dalam kontestasi politik lokal di mana kandidat yang didukung oleh PKB sering kali diidentifikasi dengan identitas NU. Dalam konteks ini, PBNU dan PKB tidak hanya terlibat dalam arena politik nasional, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan di tingkat lokal. Penelitian ini

menunjukkan bahwa hubungan antara PBNU dan PKB bukan hanya bersifat historis, tetapi juga fungsional dalam dunia politik praktis. Relasi ini dibangun di atas landasan legitimasi keagamaan yang dimiliki NU, yang kemudian digunakan oleh PKB untuk memperoleh dukungan massa dalam kontestasi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam hal ini, tokoh-tokoh NU, terutama kyai, memainkan peran sentral dalam menggerakkan massa dan memobilisasi dukungan politik, yang menjadikan relasi antara PBNU dan PKB sebagai salah satu faktor penting dalam politik Indonesia, khususnya dalam Pemilu.

Penelitian kedua dari (Haris 2012) dalam artikelnya yang berjudul "Potret Partisipasi Politik NU Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah" menguraikan perjalanan panjang keterlibatan NU dalam politik Indonesia. NU, sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang terjadi di Indonesia sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Dalam penelitian ini, Haris menekankan bahwa keterlibatan politik NU sudah berlangsung lama sebelum terbentuknya PKB, terutama melalui keterlibatannya dalam Masyumi pada awal kemerdekaan. Namun, ketidakpuasan NU terhadap kepemimpinan Masyumi yang dianggap terlalu modernis akhirnya mendorong NU untuk memisahkan diri dan mendirikan partai politiknya sendiri pada tahun 1952. Sejarah keterlibatan NU dalam politik terus berlanjut, meskipun sempat mengalami pasang surut, terutama setelah fusi partai pada masa Orde Baru yang mengharuskan NU bergabung dengan PPP. Keterbatasan ruang gerak NU di bawah rezim Orde Baru kemudian menjadi salah satu faktor pendorong bagi NU untuk kembali ke khittah pada tahun 1984, dengan fokus pada pengembangan organisasi keagamaan

dan sosial. Namun, keterlibatan NU dalam politik kembali mengemuka pada era reformasi dengan berdirinya PKB pada tahun 1998. PKB didirikan oleh tokoh-tokoh NU, termasuk Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang melihat perlunya wadah politik baru untuk menyalurkan aspirasi warga NU dalam politik nasional. Dalam konteks ini, Haris menyoroti bahwa hubungan antara NU dan PKB bukan sekadar hubungan formal antara organisasi dan partai, tetapi juga merupakan representasi dari sejarah panjang keterlibatan NU dalam politik. PKB, sebagai partai politik yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU, pada dasarnya adalah perpanjangan dari perjuangan politik NU di masa lalu. Dengan demikian, relasi antara PBNU dan PKB tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah, di mana NU selalu berusaha untuk terlibat dalam politik sebagai bagian dari upayanya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di Indonesia.

Penelitian ketiga dilakukan (Kusmayadi, Agung, and Ali 2017) dalam artikel berjudul "Model Kepemimpinan Politik Kyai: Studi Peran Kyai Dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB Dan PPP" menyoroti peran sentral kyai dalam membentuk dan mengarahkan perilaku politik massa NU. Mereka berargumen bahwa kyai memiliki otoritas besar di kalangan warga NU, yang tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam aspek politik. Peran ini membuat kyai menjadi salah satu aktor penting dalam dinamika politik di kalangan warga NU, terutama dalam konteks hubungan antara PBNU dan PKB. Kyai sering kali berfungsi sebagai mediator antara PBNU dan PKB, di mana mereka memobilisasi dukungan dari warga NU untuk mendukung PKB dalam berbagai kontestasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kyai dalam politik tidak hanya terbatas

pada ranah spiritual, tetapi juga memiliki dampak langsung pada perilaku politik umat. Dalam konteks hubungan antara PBNU dan PKB, kyai menjadi jembatan yang menghubungkan kedua entitas ini, di mana dukungan politik dari warga NU sering kali didasarkan pada rekomendasi dan arahan dari kyai. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada dinamika perubahan dalam perilaku politik massa NU. Meskipun pada awalnya NU mendukung PPP sebagai representasi politik umat Islam pada masa Orde Baru, dukungan ini mulai bergeser setelah terbentuknya PKB. PKB kemudian menjadi pilihan utama bagi warga NU dalam dunia politik, menggantikan PPP yang sebelumnya dianggap sebagai partai umat Islam tradisional. Pergeseran ini, menurut penelitian Kusmayadi dan kolega, tidak lepas dari peran kyai yang mengarahkan dukungan politik warga NU dari PPP ke PKB. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa relasi antara PBNU dan PKB tidak hanya dibangun di atas landasan historis dan ideologis, tetapi juga dipengaruhi oleh peran aktif kyai dalam membentuk perilaku politik massa.

Selanjutnya pada penelitian ke-empat dari penelitian (Saepulah 2022) artikel berjudul "Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU Dalam Merespon Perubahan Sosial", Saepulah mengkaji bagaimana NU sebagai organisasi sosial-keagamaan merespons berbagai perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. NU, yang pada awalnya dibentuk sebagai organisasi keagamaan untuk menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, telah berkembang menjadi salah satu kekuatan sosial-politik yang signifikan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa NU tidak hanya berfokus pada pengembangan aspek-aspek keagamaan, tetapi juga memiliki perhatian besar terhadap isu-isu sosial dan politik. Dalam konteks

perubahan sosial, NU sering kali menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, baik itu dalam bentuk gerakan sosial maupun keterlibatan dalam politik praktis. Saepulah menunjukkan bahwa salah satu cara NU merespons perubahan sosial adalah melalui keterlibatannya dalam politik, khususnya melalui PKB. PKB sebagai partai politik yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU menjadi alat bagi NU untuk merespons perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, baik dalam bentuk perubahan politik, ekonomi, maupun sosial. Penelitian ini juga menyoroti bahwa keterlibatan NU dalam politik tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga ideologis. NU menggunakan PKB sebagai alat untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam moderat, yang selama ini menjadi ciri khas NU. Dalam konteks ini, hubungan antara PBNU dan PKB dapat dilihat sebagai bagian dari strategi NU untuk tetap relevan dalam perubahan sosial yang terus terjadi di Indonesia. PKB, sebagai partai politik yang memiliki basis massa dari warga NU, menjadi perpanjangan tangan NU dalam dunia politik, sehingga relasi antara PBNU dan PKB selalu dinamis dan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Penelitian Kelima dilakukan oleh (Ali Saleem 2021) dengan judul *'Hinduism, hindutva and hindu populism in India: An analysis of party manifestos of indian rightwing parties'* membahas pengaruh agama Hindu, ideologi Hindutva, dan populisme Hindu dalam konteks politik India, dengan fokus pada manifesto partai-partai sayap kanan seperti Bharatiya Janata Party (BJP). Dalam konteks hubungan antara Hinduism, Hindutva, dan populisme Hindu yang dibahas oleh Raja M. Ali Saleem dengan relasi antara Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Indonesia, kita dapat melihat beberapa kesamaan

dan perbedaan yang mencolok dalam cara agama dan politik berinteraksi di kedua negara. Seperti Hindutva di India, PBNU juga memiliki pengaruh besar dalam ranah agama dan sosial, meskipun dalam konteks Islam di Indonesia. PBNU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada Islam moderat dan toleran. PKB, sebagai partai politik yang memiliki akar sejarah dalam PBNU, sering kali menggambarkan nilai-nilai agama Islam yang dikembangkan oleh PBNU, seperti inklusivitas, toleransi, dan keadilan sosial, dalam platform politiknya. Namun, perbedaan mendasar antara kedua fenomena ini adalah bahwa Hindutva, seperti dijelaskan oleh Saleem, sering digunakan sebagai alat politik oleh partai sayap kanan di India untuk memperkuat narasi mayoritarianisme berbasis identitas Hindu, yang berujung pada marginalisasi minoritas, terutama Muslim. Sementara itu, hubungan PBNU dan PKB tidak bersifat eksklusif seperti itu. Sebaliknya, PBNU dan PKB lebih menekankan pada inklusivitas dan hubungan antaragama yang harmonis di Indonesia. PKB, dalam banyak hal, menggunakan nilai-nilai Islam moderat untuk membentuk agenda politik yang lebih pluralistik, sesuai dengan prinsip-prinsip kebhinekaan yang merupakan bagian inti dari identitas nasional Indonesia. Selain itu, meskipun PBNU memiliki hubungan erat dengan PKB, PBNU sebagai organisasi cenderung menjaga jarak dari politik praktis, berbeda dengan Hindutva yang secara langsung terkait dengan ideologi politik. Relasi PBNU-PKB lebih berfokus pada nilai-nilai keagamaan yang menyokong kehidupan demokrasi dan kebangsaan, sementara Hindutva di India digunakan untuk mengonsolidasikan kekuasaan politik melalui populisme berbasis agama. Kesamaan antara Hindutva dan relasi PBNU-PKB dapat dilihat dalam

penggunaan simbol dan nilai agama untuk membentuk agenda politik. Namun, perbedaannya sangat jelas dalam pendekatan terhadap pluralisme dan minoritas. PBNU dan PKB lebih menekankan harmoni sosial dan keadilan bagi semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama, sedangkan Hindutva mempromosikan nasionalisme yang berbasis pada identitas mayoritas Hindu dan kerap mendiskriminasi kelompok minoritas.

Selanjutnya pada penelitian terakhir ini yang dilakukan oleh (Yavuz 2018) Tinjauan literatur tentang penelitian berjudul "*A Framework for Understanding the Intra-Islamist Conflict Between the AK Party and the Gülen Movement*" oleh M. Hakan Yavuz berfokus pada pemahaman konflik ideologis, politik, dan organisasi antara dua faksi Islamis penting di Turki. Dalam kerangka yang diajukan oleh Yavuz, awalnya Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan dan Gerakan Gülen yang dipimpin oleh Fethullah Gülen bersekutu karena kesamaan nilai-nilai Islamis serta tujuan bersama untuk melemahkan pengaruh elit sekuler di Turki. Namun, seiring meningkatnya kekuasaan keduanya, hubungan tersebut memburuk. Konflik ini didorong oleh perbedaan visi untuk masa depan Turki, di mana AK Party berfokus pada sentralisasi kekuasaan politik, sementara Gerakan Gülen menekankan pengaruh agama yang lebih berbasis masyarakat melalui pendidikan dan masyarakat sipil. Studi ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang konflik intra-Islamis dengan menunjukkan bagaimana perebutan kekuasaan, interpretasi Islam yang berbeda, dan persaingan untuk menguasai institusi negara dapat menyebabkan perpecahan dalam gerakan Islamis. Kerangka analisis Yavuz menyoroti beberapa

peristiwa penting yang memicu perpecahan, seperti skandal korupsi 2013 dan percobaan kudeta 2016 yang oleh Erdoğan dituduhkan kepada para pendukung Gülen. Penelitian ini penting dalam memahami bagaimana Islam politik, meskipun memiliki narasi agama yang menyatukan, dapat mengalami perpecahan ideologis dan operasional ketika ambisi politik muncul. Penelitian ini juga memberikan perspektif komparatif yang dapat digunakan untuk menganalisis konflik serupa di negara lain, seperti hubungan antara Ikhwanul Muslimin di Mesir atau Nahdlatul Ulama dan PKB di Indonesia. Jika di hubungkan antara PBNU dan PKB di Indonesia memiliki banyak kemiripan dengan konflik intra-Islamis antara AK Party dan Gerakan Gülen di Turki yang dijelaskan dalam penelitian M. Hakan Yavuz. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana organisasi berbasis agama dapat terlibat dalam politik, namun kemudian mengalami perpecahan ketika ada perbedaan kepentingan kekuasaan dan visi ideologis. Sama seperti AK Party dan Gerakan Gülen yang awalnya bersekutu karena kesamaan nilai-nilai Islam, PBNU dan PKB juga memiliki hubungan historis yang erat, dengan PKB sebagai representasi politik dari basis massa PBNU. Namun, seiring waktu, perbedaan tujuan politik antara kedua organisasi ini mulai muncul. Dalam kasus PBNU dan PKB, salah satu sumber konflik utama adalah upaya PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar untuk lebih independen dari PBNU, yang membuat PBNU merasa bahwa PKB telah menyimpang dari nilai-nilai awal yang mereka anut bersama. Dalam konteks Indonesia, PBNU merasa bahwa PKB seharusnya tetap setia pada akar-akar historis dan budaya keagamaannya, sementara PKB ingin menegaskan diri sebagai partai politik independen yang tidak sepenuhnya tunduk pada pengaruh

PBNU. Mirip dengan AK Party yang ingin mendominasi politik Turki tanpa intervensi dari Gerakan Gülen, PKB juga berusaha mempertahankan otonomi politiknya meskipun masih sangat bergantung pada basis pendukung dari *nahdliyin* yang dekat dengan PBNU. Kedua kasus ini menyoroti bagaimana ketegangan antara organisasi keagamaan dan partai politik dapat berkembang menjadi konflik ketika ada perbedaan kepentingan dalam menjalankan kekuasaan dan visi politik, meskipun pada awalnya mereka memiliki kesamaan ideologis dan tujuan.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, terlihat bahwa hubungan antara PBNU dan PKB merupakan hubungan yang kompleks dan dinamis, yang dibentuk oleh faktor sejarah, ideologi, dan peran tokoh-tokoh kunci, seperti kyai dan Gus Dur. PBNU, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam politik Indonesia, baik melalui keterlibatan langsung dalam dunia politik maupun melalui dukungannya terhadap PKB. PKB, di sisi lain, menjadi representasi politik dari warga NU yang memiliki basis ideologis dan historis yang kuat dengan NU. Hubungan antara PBNU dan PKB tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dibangun di atas landasan sosial, keagamaan, dan politik yang mendalam. Kyai sebagai pemimpin spiritual NU memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan politik bagi PKB, sementara figur seperti Gus Dur memberikan arah ideologis dan visi politik yang kuat bagi hubungan ini. Meskipun demikian, hubungan ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan dinamika perubahan, baik dalam hal perilaku politik massa NU maupun dalam merespons perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Secara keseluruhan, literatur yang dibahas menunjukkan bahwa relasi antara PBNU dan PKB tidak hanya sekadar

hubungan antara organisasi dan partai politik, tetapi juga merupakan representasi dari dinamika politik Islam di Indonesia yang lebih luas, di mana agama dan politik sering kali saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

Jelang Pemilihan Umum 2024, ketegangan antara PKB dan NU kembali terjadi, di mana ketua umum PBNU menyatakan bahwa hubungan NU dan PKB tidak erat sama seperti hubungan NU dengan partai lain, Penelitian dengan topik hubungan PKB dan NU sudah banyak dilakukan, namun pada penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas bagaimana dampak ketegangan PKB dan NU di tingkat pusat terhadap PKB dan NU di tingkat daerah, sehingga penelitian ini tertarik untuk membahas bagaimana dampak ketegangan Hubungan DPP PKB dengan PBNU terhadap PKB dan NU di Kabupaten Pekalongan dalam Pemilu Legislatif 2024. Apakah ketegangan PKB dan NU di tingkat pusat ini berpengaruh terhadap hubungan NU dan PKB di tingkat daerah khususnya Kabupaten Pekalongan.

1.6 Kerangka Teori

1. Pengertian Konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Arti konflik telah dikacaukan dengan banyaknya definisi dan konsepsi yang saling berbeda. Pada hakekatnya konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak.

Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya-sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan/atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi. (Atosokhi, 2012) Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustrasi jika tidak dapat diselesaikan. (Hasibuan, 2015)

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Konflik merupakan sebuah situasi, di mana dua orang atau lebih menginginkan tujuan-tujuan yang persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang di antara mereka, tetapi hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak.

2. Penyebab Konflik

Dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal yang utama yaitu:

- a. Komunikasi meliputi: salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten.
- b. Struktur meliputi: pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan

untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

- c. Pribadi meliputi: ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. (Tika, 2016)

Penyebab terjadinya konflik dalam organisasi, antara lain:

- a. Koordinasi kerja yang tidak dilakukan
- b. Ketergantungan dalam pelaksanaan tugas
- c. Tugas yang tidak jelas (tidak ada deskripsi jabatan)
- d. Perbedaan dalam orientasi kerja
- e. Perbedaan dalam memahami tujuan organisasi
- f. Perbedaan persepsi
- g. Sistem kompetensi insentif (*reward*). (Handoko, 2013)

3. Paradigma Konflik

Ada lima jenis konflik dalam kehidupan:

- a. Konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidak pastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya.

- b. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik juga berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antar manajer dan bawahan).
- c. Konflik antara individu dan kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok.
- d. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok.
- e. Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara, konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. (Zainal, 214)

4. Alternatif Penyelesaian konflik

Berdasarkan alternatif yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian konflik yaitu dengan cara berikut:

- a. Negosiasi. Pemecahan masalah saling menguntungkan. Masing- masing yang terlibat mencari hal-hal untuk dipertukarkan sehingga dapat diintegrasikan dalam perjanjian. Prinsip-prinsip negosiasi adalah:
 - 1) Pisahkan orang dari masalah.
 - 2) Pusatkan perhatian pada kepentingan bukan kepada posisi.
 - 3) Hasilkan berbagai kemungkinan sebelum memutuskan apa yang diharapkan.

- 4) Tekankan bahwa hasil yang dicapai berdasarkan tujuan atau sasaran dengan standar tertentu.
- b. Konsolidasi. Alternatif ini dibantu dengan bantuan berbagai fasilitas dan ada pihak ketiga yang akan berperan untuk:
- 1) Menciptakan iklim kerjasama dan saling percaya.
 - 2) Membetulkan persepsi.
 - 3) Mengurangi kekhawatiran yang tidak rasional.
 - 4) Meningkatkan komunikasi/
 - 5) Menjernihkan isu-isu
- c. Mediasi. Dalam alternatif ini melibatkan pihak ketiga yang netral, dengan peranan:
- 1) Mengadakan pertemuan-pertemuan untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang menjadi pangkal perselisihan.
 - 2) Membawa pesan dari pihak-pihak yang konflik.
 - 3) Menanamkan kesadaran tentang betapa jauhnya hubungan mereka dan menyuguhkan pilihan yang mungkin mendekatkan mereka yang konflik.
 - 4) Mengusulkan pemecahan masalah.
- d. Arbitrasi. Pemecahan dengan alternatif ini, berarti menggunakan pihak ketiga untuk memengaruhi kekuasaan pihak-pihak yang konflik sehingga mau memuaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Oleh sebab itu, pihak ketiga harus melakukan hal ini:
- 1) Memerhatikan tiap-tiap kasus untuk mencari bukti- bukti dan manfaat yang diinginkan.

- 2) Mengidentifikasi cara-cara pemecahan masalah dan pola-pola penyelesaiannya.
- e. Kompromi Penyelesaian konflik melalui kompromi, sebelumnya perlu dipahami hal berikut:
- 1) Biasanya tindakan kompromi mempunyai konotasi negatif, mengorbankan sesuatu yang dimukili.
 - 2) Menurut kemauan untuk mengakomodasikan perbedaan-perbedaan dengan pihak lain.
 - 3) Menunjuk keterbatasan apa yang terbaik bagi masing- masing pihak.
- (Mangkunegara, 2015)

5. Teori Konflik Sosial

Konflik sosial terjadi antara individu-individu atau antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda yang mana akan selalu bersaing untuk memperebutkan akses ke sumber daya yang terbatas.

Teori konflik sosial tidak hanya terbatas pada masalah kelas sosial, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti ras, gender, dan etnis. Teori konflik sosial menekankan bahwa perubahan sosial terjadi sebagai akibat dari konflik yang terus-menerus antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan. Misalnya, dalam masyarakat modern, konflik antara berbagai kelompok kepentingan seperti serikat pekerja, organisasi keagamaan, dan partai politik mencerminkan dinamika ini. Konflik tidak selalu merusak, tetapi dapat menjadi pendorong perubahan yang lebih adil dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya (Rahmatia 2019).

Lewis A. Coser, seorang sosiolog yang terkenal dengan karyanya dalam teori konflik sosial mengembangkan gagasan George Simmel yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh benturan kepentingan antar individu atau kelompok yang saling bertentangan. Pandangan Coser dalam analisisnya "*The Functions of Social Conflict*" menyebutkan bahwa konflik merupakan bentuk interaksi sosial dasar, hal ini pasti terjadi dan tidak dapat lepas dari kondisi manusia yang saling berinteraksi, Coser menganggap interaksi manusia dapat menimbulkan unsur perilaku permusuhan yang menyebabkan terjadinya konflik (Susan, 2009).

Coser membagi dua tipe konflik dasar yaitu konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik realistik merupakan konflik yang dapat terjadi antar individu dan kelompok atau kelompok dengan kelompok, contohnya dua individu yang sudah lama berteman dengan sifat yang sama-sama egois kemudian memiliki pendapat berbeda sehingga timbul konflik antar individu. Sedangkan konflik non realistik adalah konflik yang tidak berasal dari tujuan-tujuan buruk melainkan kebutuhan untuk meredakan ketegangan, contohnya balas dendam dengan menjadikan seseorang sebagai kambing hitam atas pembalasan dendam tersebut.

Coser menyatakan bahwa konflik memiliki fungsi penting dalam masyarakat, terutama dalam memperjelas posisi kelompok, memperkuat solidaritas internal, dan mendorong perubahan sosial yang dibutuhkan. Menurutnya, konflik konstruktif adalah jenis konflik yang, meskipun mungkin keras dan menimbulkan ketegangan, tetap memiliki potensi untuk memperbaiki struktur sosial yang ada dan memperkuat hubungan antara kelompok. Dalam pandangannya, konflik yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan dialog yang lebih dalam antara

kelompok-kelompok yang berkonflik, sehingga mereka dapat mencapai pemahaman bersama dan menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak (Dodi 2017).

A. Teori *Vested Interest*

Dalam ilmu sosial, teori *vested interest* mengacu pada kepentingan pribadi yang kuat dan terintegrasi dalam kelompok. Kepentingan pribadi ini dapat berupa kepentingan individu atau sekelompok orang yang memiliki posisi tertentu dalam sistem sosial. Kepentingan pribadi ini dapat berupa kepentingan yang terkait dengan keuntungan, keamanan, atau status yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut. Dalam teori *vested interest*, kepentingan pribadi ini dapat menjadi penghambat perubahan sosial karena individu atau kelompok yang memiliki kepentingan pribadi terhadap hal-hal tertentu memiliki kepentingan yang lebih besar daripada yang mereka inginkan.

Konsep teori *vested interest* yang dijelaskan oleh Moe (2015) adalah bahwa dalam setiap kebijakan publik dan institusi politik, terdapat kepentingan yang tersemat secara dalam bagi kelompok-kelompok tertentu yang akan mendapat manfaat dari apa yang dilakukan oleh institusi tersebut. Hal ini mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pertahanan, pertanian, transportasi, perdagangan internasional, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini memiliki insentif kuat untuk melindungi institusi-institusi tersebut ketika dihadapkan pada reformasi yang mengancam, dan dalam politik perubahan, mereka memiliki potensi menjadi kekuatan yang kuat untuk stabilitas.

Dalam teori Moe, *vested interest* dilihat sebagai kekuatan yang menjaga status quo dan menghambat perubahan. Mereka mungkin termasuk kelompok-kelompok bisnis, kepentingan politik, atau kelompok-kelompok lain yang merasa terhubung dengan kebijakan dan institusi tertentu. Peran utama mereka adalah melindungi keuntungan atau kepentingan yang mereka peroleh dari institusi yang ada, dan ini mempengaruhi dinamika politik dan proses perubahan.

B. Teori Politik Kolaborasi

Politik kolaborasi merupakan politik bekerja sama khususnya dalam upaya menggabungkan pemikiran. Hal tersebut berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Gray, menjelaskan bahwa kolaborasi sebagai sebuah proses berfikir di mana pihak yang ikut memandang aspek-aspek perbedaan dari sebuah masalah serta mendapat solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka mengenai apa yang bisa dilakukan. Kolaborasi juga didefinisikan sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesamaan, dan tanggung jawab di mana pihak yang berkolaborasi mempunyai tujuan yang sama, kesamaan persepsi, keinginan untuk berproses, saling memberi manfaat, kejujuran, kasih sayang dan berbasis masyarakat (Gray, 1989).

Menurut Fendt ada tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu; organisasi membutuhkan kolaborasi untuk menyelesaikan suatu tugas bersama pihak lain karena tidak dapat dilakukan sendiri, dengan berkolaborasi keuntungan yang didapatkan oleh organisasi dapat lebih banyak dibandingkan bekerja sendiri, dengan berkolaborasi suatu organisasi dapat menekan biaya produksi. (Fendt T. C., 2010)

Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau irisan dengan pihak lain maka kolaborasi masih tetap diperlukan. Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai dari tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi. Dalam menjalankan kolaborasi sangat penting untuk memahami kinerja lembaga publik. Oleh sebab itu maka studi kolaborasi lebih banyak berfokus pada tataran organisasi organisasi sektor publik (Nawawi, 1984).

Kolaborasi dengan kerjasama tim adalah suatu hal yang berbeda karena kolaborasi memiliki batas waktu yang panjang. Sebagai sebuah proses, kolaborasi merupakan interaksi di antara beberapa orang yang terus berkelanjutan. Dalam melakukan kolaborasi, diperlukan perencanaan bersama sehingga tanggung jawab dalam implementasinya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sebagaimana pernyataan Lindeke dan Sieckert yang mengatakan kolaborasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan *sharing* pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama (L. Lindeke, 2005)

Kolaborasi bertujuan untuk mencapai target bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, seperti yang dinyatakan oleh Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, di mana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. (Abdulsyani, 2007) Demikian juga menurut Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa “kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan

pembagian tugas, di mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama”.

Kolaborasi tidak mengenal bentuk dan tempat. Kolaborasi merupakan suatu pertukaran tentang pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator atau pihak yang terlibat. Pada sektor publik misalnya, kolaborasi dapat dipahami sebagai proses kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya memiliki keterhubungan. Kolaborasi dalam sektor publik dapat dilakukan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik di mana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu maka kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta mendahulukan kepentingan yang berbasis pada masyarakat atau konsumen. Pihak-pihak yang menjadi entitas dalam berkolaborasi tersebut bisa dari *government*, *civil society*, dan *private sector*. Tujuan utama dalam kolaborasi sektor publik diperuntukkan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat. (Nawawi, 1984)

Lebih lanjut Edward M Marshal mengatakan bahwa Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Diabad ke-21 (dua puluh satu) saat ini, kolaborasi merupakan pendekatan utama yang dapat menggantikan pendekatan hirarki. Pendekatan hirarkhi dianggap sebagai sebuah pendekatan yang sudah

usang, mengingat bahwa pendekatan seperti ini (hirarkhi) diperlukan proses yang panjang dan bertingkat. (Marshall, 1995)

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simeteris dengan negosiasi tingkat tinggi melalui intertivotas dan adanya saling ketergantungan. (Abdulsyani, 2007)

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik kolaborasi adalah politik interaksi yang kompleks dan beragam, yang melibatkan beberapa orang atau beberapa lembaga untuk saling bekerja sama dengan menggabungkan berbagai pemikiran secara berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal di mana setiap pihak yang terlibat memiliki saling ketergantungan.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel sebagai berikut.

1. Konflik Sosial

Pengertian konflik sosial adalah suatu proses interaksi sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara merusak atau melemahkan. Konflik ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan pendapat antar individu, perselisihan antar kelompok, hingga bentrokan antar negara. Konflik sosial pada dasarnya adalah bentuk interaksi sosial yang ditandai dengan adanya ketidaksetujuan, pertentangan, atau persaingan antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Konflik sosial tidak selalu bersifat negatif, namun dapat juga menjadi pendorong perubahan sosial dan memperkuat solidaritas kelompok. (Damsar, 2010)

Konflik sosial adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber, dan/atau tindakan salah satu pihak menghalangi, mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. (Sarwono, 2009)

Jadi dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa konflik sosial adalah sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti: nilai, status, kekuasaan, kekuatan sosial, dan proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok.

2. *Political Conflict* (Konflik Politik)

Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Hal ini diperkuat oleh Ramlan Surbakti yang menyatakan konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah, sehingga dapat diketahui bahwa Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai. (Soekanto, 2016)

Berkaitan dengan konflik, dalam studi ilmu-ilmu sosial dikenal dua pendekatan, yakni pendekatan struktural fungsional (konsensus) serta struktural konflik. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi namun saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Sedangkan pendekatan konflik berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Selain itu masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik. Lebih lanjut Ramlan Surbakti menegaskan bahwa konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. (Surbakti, 2010)

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, di mana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik. Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, di mana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan. Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan. (Budiardjo, 2018)

Konflik sosial dan konflik politik mempunyai satu perbedaan, di mana konflik sosial terjadi di lingkungan masyarakat sedangkan konflik politik terjadi diantara para elit politik dan didalam suatu pemerintahan, konflik terjadi karena isu-isu yang tidak baik, ataupun bisa disebabkan oleh rasa kebencian dan prasangka terhadap lawan konflik yang berupaya menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor yang menggerakkan potensi konflik menjadi terbuka (*manifest conflict*), menurut Eric Hoffer adalah faktor keinginan akan perubahan dan keinginan mendapat pengganti Faktor tersebut, suatu saat, mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner. (Rauf, 2011)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konflik politik adalah perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah.

3. Kerjasama

Kerjasama adalah sebuah sikap melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Samani bahwa kerjasama yaitu sifat suka kerjasama atau gotong royong adalah tindakan atau sikap mau bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan bersama. Karakter kerjasama perlu diterapkan pada anak sejak kecil, karena karakter dapat menjadi bekal bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. (Abdulsyani, 2007)

Kerjasama adalah sesuatu yang terjadi secara alami, kelompok dapat maju dengan baik apabila ada kerjasama yang baik pula antar sesama anggota kelompok. Kerjasama tersebut tidak dibuat-buat, melainkan antar anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Johnson, Elaine B yang menyatakan bahwa setiap bagian kelompok saling berhubungan sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang dipunyai seseorang akan menjadi output bagi yang lain, dan output ini akan menjadi input bagi yang lainnya. (Ahmadi, 2015)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah terjadi secara alami yang berupa sebuah tindakan atau sikap mau melakukan kerjasama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Bekerjasama dapat membuat pikiran

seseorang menjadi luas sehingga mampu mengetahui kelemahan yang ada pada dirinya dan mau untuk menghargai, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengambil keputusan secara bersama.

4. Politik Islam

Politik Islam disebut juga *siyasah syar'iyah*. Dalam fiqh Islam Sunni, *siyasah* terdapat pada kata *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berlandaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Merupakan pemikiran yang berbeda dengan pemikiran politik Barat. Menurut Syamsudin Arif Politik Islam adalah politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Mengingkari Politik Islam, berarti mengingkari adanya politisi Muslim. As-siyasatus sar'iyah adalah politik Islam. (Mufti, 2015)

Berdasarkan pengertian di atas, maka politik Islam adalah politik yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dalam pemikirannya. Sumber lain dari landasan politik Islam adalah sirrah, akal, dan fiqh ikhtilaf. Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa sumber dari pemikiran politik Islam ada empat, yaitu: Pertama, Wahyu (*naql*) merupakan sumber utama dalam pemikiran politik Islam karena wahyu bersumber dari Tuhan berupa Al-Qur'an. Kedua, *Sirrah* bisa dimaknai sebagai qiyas dan ijma (ijtihad para ulama) sumber ini menyebabkan munculnya aliran baru dalam pemikiran Islam baik itu madzhab fiqh atau madzhab kalam yang mempunyai perbedaan tentang politik Islam dan dominasi wahyu dan akal. Permasalahan pertama yang muncul setelah Rasulullah SAW wafat adalah permasalahan politik yang ditandai dengan perdebatan siapa yang pantas menggantikan kepemimpinan umat Islam. Ketiga, akal atau aql selain

naqli atau yang bersumber dari wahyu dalam politik Islam juga menggunakan akal sebagai dasar pengambilannya. Akal telah terbukti dapat memecahkan berbagai permasalahan berbagai persoalan kehidupan, seperti dapat menjelaskan gejala-gejala alam sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Lebih jauh lagi ada golongan yang mengutamakan akal yaitu muktazilah yang menganggap bahwa tidak adanya wahyu pun akal sudah cukup sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Keempat, fiqh ikhtilaf, dalam politik Islam tentu banyak pandangan yang berbeda dan ikhtilaf ini merupakan jembatan dari berbagai sumber yang telah disebutkan. (Abdala, 2012)

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengacu pada model penelitian kualitatif dari John W. Creswell (Mulyadi 2013), yang menekankan pentingnya proses pengumpulan dan analisis data yang berfokus pada makna-makna yang diberikan oleh partisipan penelitian terhadap fenomena yang mereka alami. Creswell juga menekankan fleksibilitas dalam pengumpulan data, termasuk melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data bersifat induktif, berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomenasosial-politik yang terjadi.

1.8.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut (Creswell, 2014), metode penelitian kualitatif melibatkan

pengumpulan data secara langsung dari subjek yang diteliti melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Peran dalam instrumen utama pengumpulan data, di mana analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada interpretasi makna dan proses daripada hasil yang dapat digeneralisasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan makna yang mendalam dari pengalaman para partisipan.

1.8.2. Sumber data

Sumber data di dapatkan dari buku atau literatur tertulis lainnya dan data dari informan. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh DPC PKB Kabupaten Pekalongan seperti: Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026, Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026, Anggota legislatif dari DPC PKB Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026, serta tokoh PCNU Kabupaten Pekalongan seperti Rais Syuriah PCNU Kabupaten Pekalongan periode tahun 2024-2029, dan Badan otonom PCNU Kabupaten Pekalongan seperti: Ketua Muslimat Kabupaten Pekalongan, Ketua Fatayat NU Kabupaten Pekalongan, Pengurus GP Anshor Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut antara lain:

1. Informan merupakan tokoh yang masih aktif di DPC PKB Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026.

2. Informan merupakan tokoh yang masih aktif di PCNU Kabupaten Pekalongan periode 2024-2029.
3. Informan merupakan tokoh yang masih aktif di Badan Otonom PCNU Kabupaten Pekalongan periode 2024-2029.

1.7.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ketegangan antara DPP PKB dan PBNU di tingkat pusat pada pemilu 2024 serta dampaknya terhadap pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, observasi lapangan, dan cara-cara lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai topik penelitian.

1. Observasi

Menurut Nasution dalam (Sugiono 2020:113) observasi adalah kondisi di mana dilakukan pengamatan secara langsung untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga memungkinkan untuk memperoleh pandangan yang holistik.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam (Sugiono 2020:114) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat memberikan kontribusi makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiono 2020:124) dokumentasi adalah pengumpulan catatan peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar/foto, atau karya-karya monumental dari seseorang atau instansi.

1.7.5 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut agar data benar-benar valid. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi:

1. Triangulasi data/sumber. Triangulasi data/sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Pada triangulasi ini peneliti tidak hanya menggunakan informasi dari satu informan saja, tetapi informasi dari para informan di lingkungan tempat penelitian.
2. Triangulasi metode. Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Pada teknik ini pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan

bagian integral dari kegiatan analisis data. Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Huberman adalah:

1. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Reduksi Data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasikan.
2. Paparan data (*data display*) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.